

kinerja pegawai SKPD tersebut. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah pemahaman pihak eksekutif mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Kinerja pegawai adalah Hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Bila dikaitkan dengan organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah pemahaman yang memadai tentang akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah termasuk satuan kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hasil uji t Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada SKPD pemerintah Kota Medan. Berdasarkan nilai signifikan ($0,000 < 0,005$), maka keputusannya adalah H_0 diterima, H_1 ditolak.
2. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pegawai pada SKPD pemerintah Kota Medan sebesar 75,5%. Dikatakan kuat karena hubungan tersebut $>50\%$, , sedangkan sisanya yaitu 24,5% ($100\% - 75,5\%$) dijelaskan oleh variable-variabel lain diluar penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengambilan responden dilakukan pada satu kota saja. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk objek diluar penelitian. Hasil penelitian mungkin akan berbeda untuk kota lain.
2. Data yang dihasilkan melalui penggunaan responden mendasarkan kepada persepsi responden. Data tersebut tidak terlepas dari unsure subjektivitas. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner mungkin saja berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh kota yang ada di kota lain.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di SKPD kota Medan kiranya memahami sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan perkembangan dan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini dalam menjalankan tugasnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup atau wilayah penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penelitian ini dan menambah atau mengubah variable independent yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai pada pemerintah kota Medan.